

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perhitungan luas suatu negara diukur berdasarkan total area antara wilayah daratan, dan wilayah perairan. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 telah ditegaskan bahwa wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk juga seluruh sumber kekayaan yang ada di dalamnya. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 2024, Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 1.905 juta km persegi dan luas wilayah perairan seluas 3.257 juta km persegi, dengan data tersebut total luas wilayah daratan dan perairan maka luas wilayah Indonesia adalah 5.180 juta km persegi, dalam data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan, yaitu sebesar 35 persen wilayah daratan dan 65 persen wilayah perairan. Adanya fakta bahwa wilayah perairan lebih luas dari wilayah daratan tersebut maka Indonesia tepat dikatakan sebagai negara maritim.

Indonesia merupakan negara maritim, karena Indonesia memiliki 17.001 pulau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), dengan garis pantai terbesar setelah Kanada, yaitu seluas 108.000 km. Dua per tiga wilayah Indonesia berupa lautan sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat tinggi, meliputi perikanan, ekosistem laut, energi, dan mineral laut (Ramadhani,

2023). Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, dan beberapa jenis ikan yang dapat diklasifikasikan sebagai langka dan terancam punah.

Sektor perikanan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Secara umum, sektor ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kontribusinya sangat luas, mulai dari penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, hingga menyumbang devisa bagi negara. Indonesia sendiri memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, baik dari segi jumlah maupun keanekaragaman jenisnya, potensi besar ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal, oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih baik dan inovasi berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan meningkatkan nilai tambah sektor ini.

**Tabel 1. 1 Volume Produksi Perikanan Republik Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Perikanan Tangkap (Ton)</b>
2021	6.767.566
2022	7.026.428
2023	7.373.516
2024	7.392.836

*Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*

Berdasarkan data Produksi Perikanan Republik Indonesia perikanan tangkap di Indonesia secara nasional menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap mencapai sekitar 7,3 juta ton dengan nilai produksi lebih dari Rp220 triliun, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 7,2 juta ton dengan nilai produksi Rp194,9

triliun, data sementara hingga November 2024 menunjukkan produksi perikanan tangkap telah mencapai 6,7 juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat setelah proses validasi data selesai. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan sistem pencatatan di pelabuhan perikanan serta penerapan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi yang meningkatkan akurasi data dan pelayanan perizinan kapal perikanan. Pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap telah melampaui target dengan capaian 3,34 juta ton, didominasi oleh ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, dan tongkol, serta ikan pelagis kecil seperti kembung dan layang. Jumlah kapal perikanan yang beroperasi dengan izin pusat juga meningkat, mencapai lebih dari 14.600 unit, yang menunjukkan tata kelola perikanan tangkap yang semakin baik di tingkat nasional. Pulau Jawa meskipun dikenal sebagai pusat kepadatan penduduk dan industrialisasi, tetap berkontribusi penting terhadap produksi perikanan tangkap. Pantai utara Jawa, terutama di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, merupakan lokasi strategis bagi aktivitas perikanan tangkap karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang kaya akan berbagai jenis ikan.

Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki garis pantai yang cukup panjang, menyimpan potensi besar dalam sektor perikanan tangkap. Wilayah pesisir provinsi ini terbentang dari utara hingga selatan, mencakup perairan Laut Jawa di sebelah utara dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Kondisi geografis ini menjadikan Jawa Barat sebagai daerah yang strategis untuk kegiatan perikanan, terutama dengan keberadaan beberapa pelabuhan perikanan yang aktif dan berkembang. Pelabuhan seperti Pelabuhan Ratu di

Sukabumi yang menghadap Samudera Hindia, Pelabuhan Perikanan Nusantara Cirebon di pesisir utara, dan Pelabuhan Karangsong di Indramayu, menjadi pusat aktivitas nelayan dalam menangkap dan mendistribusikan hasil laut ke berbagai wilayah.

Kegiatan perikanan tangkap di Jawa Barat sebagian besar dilakukan oleh nelayan skala kecil hingga menengah yang menggunakan armada berupa perahu motor dan perahu tempel, mereka mengandalkan alat tangkap yang bervariasi, mulai dari jaring insang, pancing ulur, hingga purse seine, baik dengan metode tradisional maupun yang sudah mulai terintegrasi teknologi modern. Meskipun berskala kecil, kontribusi mereka terhadap suplai ikan lokal dan regional sangat besar.

Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat mencatat total produksi perikanan tangkap sebesar 277.609 ton. Angka ini mencakup dua sumber utama, yaitu perikanan tangkap di laut sebesar 261.554 ton dan perikanan tangkap dari perairan umum daratan sebesar 16.055 ton. Data ini menunjukkan bahwa perikanan tangkap masih menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian di wilayah pesisir provinsi tersebut. Di antara seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu menempati posisi teratas sebagai penyumbang terbesar dalam produksi perikanan tangkap. Kabupaten Indramayu, yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun energi. Potensi alam yang melimpah menjadikan Indramayu sebagai salah satu

daerah strategis dalam menopang sektor ekonomi di wilayah pantai utara (Pantura) Jawa.

Sektor pertanian merupakan salah satu kekuatan utama sumber daya alam di Kabupaten Indramayu. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional karena memiliki lahan sawah yang luas dan sistem irigasi yang relatif baik. Di sisi lain, potensi sumber daya alam dari sektor perikanan juga sangat besar. Letaknya yang berada di pesisir menjadikan Indramayu memiliki garis pantai yang panjang dengan wilayah laut yang kaya akan hasil tangkapan ikan. Banyak masyarakat di daerah pesisir seperti Desa Karangsong, Eretan, dan lainnya yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Potensi ini menjadi kekuatan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Kabupaten Indramayu berhasil mencatat produksi perikanan tangkap sebesar 175.261 ton pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 165.737 ton berasal dari perikanan laut, sementara 9.524 ton lainnya berasal dari penangkapan di perairan umum daratan seperti sungai, danau, dan waduk. Jika dibandingkan dengan total produksi Jawa Barat, kontribusi Indramayu mencapai sekitar 63,1 persen. Ini berarti lebih dari separuh hasil tangkapan ikan di Jawa Barat berasal dari wilayah ini, menandakan pentingnya peran strategis Kabupaten Indramayu dalam menyokong sektor perikanan di tingkat provinsi.

**Tabel 1. 2** (BPS PROVINSI JAWA BARAT, 2024)

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)</b> <b>(Ton)</b>
Sukabumi	6.820
Cianjur	1.143
Garut	2.020
Tasikmalaya	1.058
Cirebon	39.069
Indramayu	165.737
Subang	23.110
Karawang	9.198
Bekasi	6.298
Pangandaran	1.403
Kota Cirebon	5.698
Jawa Barat	261.554

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat*

Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap laut. Dari berbagai kabupaten/kota yang memiliki aktivitas perikanan, Kabupaten Indramayu menempati posisi paling dominan dalam hal produksi ikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat bahwa total produksi perikanan tangkap laut di Jawa Barat mencapai 261.554 ton. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Indramayu menyumbang sebanyak 165.737 ton, atau lebih dari 63 persen dari total produksi

provinsi. Tidak hanya dari sisi volume, nilai produksi perikanan tangkap laut di Indramayu juga sangat tinggi, yakni sekitar Rp3,13 triliun dari total Rp6,18 triliun nilai produksi se-Jawa Barat.

Dominasi Indramayu dalam produksi perikanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografisnya yang strategis, berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan memiliki garis pantai yang luas. Aktivitas nelayan di berbagai kecamatan pesisir seperti Karangsong, Eretan, dan sekitarnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Selain itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangsong turut memperkuat posisi Indramayu sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap di wilayah ini. Jenis hasil tangkapan yang melimpah seperti tongkol, kembung, udang, dan cumi-cumi menjadi komoditas unggulan yang dipasarkan tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga regional dan nasional

**Tabel 1. 3 Total Produksi Ikan di Kabupaten *Indramayu***

<b>Tahun</b>	<b>Total Produksi Ikan</b>
2021	526.793 ton
2022	526.841 ton
2023	551.632 ton
2024	523.265 ton

*Sumber: Diskanla Kabupaten Indramayu, BPS Kabupaten Indramayu, Website*

*Kabupaten Indramayu*

Kabupaten Indramayu (Handayani, 2023) (Desa Karangsong, 2026) (Pemerintah Desa Karangsong, 2026) terus menunjukkan konsistensi dan

peningkatan dalam sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap laut. Pada tahun 2021, produksi perikanan di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 526.793 ton, yang berasal dari kombinasi sektor perikanan tangkap dan budidaya (Diskanla Kabupaten Indramayu, 2021). Pada tahun 2022, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Indramayu berkontribusi sebesar 165.737 ton dari total produksi perikanan tangkap laut Jawa Barat yang mencapai 261.554 ton, menjadikannya kontributor terbesar dengan persentase lebih dari 63% (BPS Kabupaten Indramayu, 2023). Memasuki tahun 2023, Kabupaten Indramayu kembali mencatat prestasi gemilang dengan kontribusi sebesar 34,63% dari total produksi perikanan Jawa Barat yang mencapai 1.592.694,75 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu pada tahun tersebut mencapai 551.632,81 ton, dengan rincian 174.131,77 ton berasal dari perikanan tangkap dan 377.501,04 ton dari perikanan budidaya (Diskanla Kabupaten Indramayu, 2023). Pada tahun 2024, Kabupaten Indramayu kembali menunjukkan dominasinya dengan kontribusi sebesar 32,70% dari total produksi perikanan Jawa Barat yang mencapai 1.600.304,93 ton. Produksi perikanan di Kabupaten Indramayu pada tahun tersebut mencapai 523.265,16 ton, dengan 178.319,59 ton berasal dari perikanan tangkap dan 344.945,57 ton dari perikanan budidaya (Kabupaten Indramayu 2025).

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah sentra produksi ikan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dengan kondisi geografis yang strategis berupa wilayah pesisir yang panjang, Indramayu memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Produksi ikan di Indramayu berasal dari dua sektor utama, yaitu perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya. Pada sektor perikanan

tangkap laut, nelayan Indramayu memanfaatkan sumber daya laut yang kaya dengan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan layur, tongkol, kembung, dan jenis-jenis ikan lainnya yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, perikanan budidaya di wilayah ini juga berkembang pesat, terutama budidaya bandeng dan udang, yang turut menyumbang jumlah produksi ikan secara keseluruhan. Produksi ikan di Indramayu dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, dengan produksi total mencapai ratusan ribu ton setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan pangan lokal dan regional, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di daerah tersebut. Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan dukungan infrastruktur seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangsong menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan peningkatan produksi ikan di Indramayu. Kebijakan pemerintah daerah dan program pelatihan juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perikanan, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan terus meningkat.

Produsen ikan terbesar di Provinsi Jawa Barat tersebut tentunya tidak lepas dari peran Masyarakat Nelayan yang ada di Kabupaten Indramayu, karena Mata pencaharian masyarakat yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu ini mayoritas adalah Nelayan, mata pencaharian masyarakat Kabupaten Indramayu bergantung pada sumber daya alam yang ada disekitar masyarakat itu sendiri, mayoritas masyarakat di daerah pesisir memiliki mata pencaharian dari sektor perikanan, yakni seperti Nelayan, Pembudidaya ikan, dan pedagang hasil laut,

Nelayan. Marta dan Andry, (2020) menjelaskan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di pesisir dan sangat bergantung pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pesisir. Adanya potensi perikanan yang besar, seharusnya profesi sebagai Nelayan ini sudah masuk dalam tingkat masyarakat yang sejahtera, namun pada kenyataannya masyarakat Nelayan merupakan masyarakat yang tertinggal, karena sebagian masyarakat nelayan belum dapat mengoptimalkan potensi dari kekayaan perairan, terutama dalam sektor perikanan.

Nelayan dengan kapal ikan 5 GT tergolong nelayan skala kecil, Istilah perikanan skala-kecil telah digunakan untuk mencirikan suatu sub-sektor perikanan untuk membedakannya dengan perikanan skalas dengan dan skala-besar. Triyanti nam Firdaus, (2016) dalam penelitiannya tentang karakteristik nelayan di Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa nelayan dengan armada berukuran kurang dari 5 GT termasuk dalam kelompok nelayan tradisional atau nelayan kecil yang dominan di wilayah pantai utara Jawa. Menurut permen No. 17 Tahun 2021 Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Masyarakat nelayan kecil di Indramayu masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang membuat mereka rentan terhadap kemiskinan, potensi ini belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan . Produksi ikan yang besar, terdapat ironi sosial yang mencolok, mayoritas nelayan Indramayu justru hidup dalam kemiskinan. Mereka tergolong sebagai

kelompok rentan yang secara ekonomi tidak stabil. Penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras dan risiko besar yang dihadapi saat melaut.

Desa KarangSong di Kecamatan Indramayu, Total warga Desa Karangsong Pada 2021 sebanyak 6.576 jiwa dengan masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.427 jiwa dan perempuan sebanyak 3.149 jiwa. Dari jumlah masyarakat Desa Karangsong, berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebanyak 80% dari total masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan (Tati, 2022). Kemiskinan yang terjadi di Desa Karangsong ini dijelaskan oleh Mutiar (2018) menggunakan Garis Kemiskinan BPS, menyatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami nelayan kecil Karangsong 46.15% berada di bawah garis kemiskinan.

Desa Karangsong yang memiliki banyak warganya yang bekerja sebagai Nelayan, Hampir semua pemuda desa memilih untuk menjadi nelayan. Menurut Lambe et al., (2021) hal ini karena sebagian pemuda nelayan terpaksa terjun melaut akibat desakan kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan pribadi seorang pemuda. Hal ini tentu didukung oleh motivasi para pemilik kapal yang berlomba-lomba mengembangkan usaha mereka dengan menambah jumlah kapal, sekaligus meningkatkan kapasitas kapal berkali-kali lipat untuk meraup tangkapan yang sebanyak-banyaknya, namun karena sangat menggiurkannya menjadi Nelayan, para Nelayan yang masih muda sering kali mengabaikan pendidikan, sehingga pengetahuan tentang menjadi nelayan ini, langsung mereka dapatkan berdasarkan pengalaman tanpa mengasah keahlian dan keterampilan, dan pendidikan formal untuk mereka pun sangat diabaikan, sehingga peran pemberdayaan dari Dinas

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu terhadap masarakat Nelayan ini tentunya sangat penting dijalankan.

Menurut Kusnadi (2002:202), tekanan sosial ekonomi yang dihadapi oleh nelayan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor alamiah dan non-alamiah. Faktor alamiah meliputi perubahan musim penangkapan ikan serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Sementara itu, faktor non-alamiah mencakup terbatasnya akses terhadap teknologi penangkapan, kekurangan modal, ketimpangan dalam sistem pembagian hasil, serta ketiadaan jaminan sosial yang jelas bagi tenaga kerja nelayan, terutama tentang keahlian nelayan.



**Gambar 1. 1 Nelayan Indramayu Mengamuk di SPBN Karangsong**

*Karangsong*

*Sumber: Republika Online*

Insiden amukan nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) KPL Mina Sumitra Karangsong, Kabupaten Indramayu, yang terjadi pada 18 Oktober 2023, mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang masih rentan, serta minimnya perhatian terhadap pemberdayaan kelompok nelayan tradisional. Kejadian ini bukan sekadar bentuk kekecewaan spontan, melainkan sebuah ekspresi frustrasi yang mencerminkan realitas kompleks tentang kemiskinan, keterbatasan akses teknologi, dan rendahnya tingkat pemberdayaan yang dialami oleh sebagian besar nelayan di wilayah tersebut.

Pemerintah melalui kebijakan baru mewajibkan penggunaan aplikasi digital untuk pembelian solar bersubsidi, yang sebelumnya dapat diakses dengan hanya membawa KTP dan E-Pas Kecil. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dan efisiensi distribusi bahan bakar, namun, dalam implementasinya, banyak nelayan tidak mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknologi, seperti memiliki ponsel pintar, email aktif, atau kemampuan menggunakan aplikasi. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara niat baik kebijakan dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil.

Mayoritas nelayan di Karangsong merupakan nelayan tradisional yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Mereka menggantungkan hidup pada hasil laut yang tidak menentu, dengan penghasilan yang fluktuatif tergantung musim, cuaca, dan harga pasar. Mereka juga terbebani oleh biaya operasional melaut, termasuk pembelian bahan bakar yang merupakan komponen utama. Ketika akses terhadap bahan bakar dipersulit tanpa adanya pendampingan atau pelatihan, hal ini

secara langsung mengancam sumber penghidupan mereka. Rasa putus asa dan ketidakberdayaan inilah yang kemudian memunculkan aksi protes keras, seperti membanting jeriken dan menutup akses SPBN.

Insiden ini menjadi cermin dari lemahnya upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang seharusnya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan alat tangkap atau modal, tetapi juga mencakup pendidikan fungsional, pelatihan teknologi, penguatan literasi digital, dan pendampingan dalam memahami kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam kasus ini, sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi digital dinilai sangat minim. Nelayan merasa tidak dilibatkan dalam proses transisi kebijakan, sehingga terjadi keterkejutan kolektif yang berujung pada konflik terbuka.

Insiden ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana kebijakan harus selalu mempertimbangkan dimensi sosial dan kesiapan masyarakat penerima. Ketimpangan digital antara kelompok yang melek teknologi dan masyarakat pesisir tradisional harus dijawab dengan program pemberdayaan yang inklusif dan kontekstual. Pemerintah daerah, instansi perikanan, dan lembaga swadaya masyarakat perlu bekerja sama merancang program pelatihan penggunaan teknologi yang sederhana dan adaptif, serta memberikan ruang partisipasi bagi nelayan dalam setiap kebijakan yang menyangkut hak hidup mereka.

Peningkatan kapasitas nelayan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penyediaan akses informasi yang adil, maka nelayan akan lebih siap menghadapi tantangan modernisasi dalam sektor perikanan. Hal ini tidak hanya

akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga mencegah konflik horizontal dan resistensi terhadap perubahan yang kerap muncul akibat kurangnya komunikasi dan pemahaman.

Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu merupakan salah satu pusat produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat. Melimpahnya sumber daya ikan laut menjadikan wilayah ini sebagai tulang punggung ekonomi pesisir. Namun, potensi tersebut masih menyisakan ironi: sebagian besar nelayan Karangsong masih hidup dalam kondisi kesejahteraan yang rendah, disertai minimnya akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan keterampilan modern dalam mengelola hasil laut.

Kesenjangan antara kekayaan alam dan kualitas hidup nelayan menjadi semakin nyata dalam peristiwa yang terjadi pada Oktober 2023, ketika nelayan Karangsong memprotes kebijakan baru pembelian BBM bersubsidi berbasis aplikasi digital. Aksi ini merupakan cerminan ketidakmampuan nelayan dalam beradaptasi terhadap kebijakan baru karena rendahnya literasi digital, serta minimnya program pendampingan dan pelatihan yang seharusnya dilakukan sebelum kebijakan dijalankan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menjadi sangat relevan. Perda ini secara eksplisit memuat mandat untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan, pendidikan, dan penyediaan sarana-prasarana penunjang kegiatan perikanan. Dalam Pasal-pasalnya, perda ini juga menekankan pentingnya kemudahan akses pembiayaan, perlindungan terhadap risiko usaha (seperti asuransi nelayan), dan penguatan kelembagaan nelayan lokal. Pada kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa implementasi dari Perda ini masih jauh dari ideal. Program pelatihan dan pendampingan belum menyentuh seluruh kelompok nelayan, khususnya di desa-desa seperti Karangsong. Padahal, jika perda ini dijalankan secara konsisten dan komprehensif, berbagai permasalahan yang dialami nelayan seperti kebingungan terhadap regulasi baru, ketergantungan pada sistem tradisional, dan rendahnya daya saing dapat diminimalisir. Perda ini seharusnya menjadi kerangka kerja utama dalam mendesain kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan yang tepat sasaran, dengan optimalisasi pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2019, diharapkan nelayan Karangsong tidak lagi menjadi korban dari perubahan kebijakan yang tidak inklusif, tetapi justru menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif, dan sejahtera. Hal ini juga akan memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kondisi nelayan di Desa Karangsong yang masih menghadapi tantangan dalam hal pendidikan, pelatihan, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan modern, menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kejadian nelayan Karangsong yang memprotes kebijakan pembelian BBM subsidi melalui aplikasi menjadi bukti nyata bahwa minimnya literasi digital dan keterampilan teknis masih menjadi persoalan mendasar.

Permasalahan yang terjadi pada nelayan kecil juga sering kali terjadi bukan hanya sekedar berkaitan dengan hasil tangkapan, nelayan kecil di Desa Karangsong juga dihadapkan pada risiko keselamatan kerja yang tinggi. Aktivitas

penangkapan ikan dilakukan di lingkungan laut yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, terutama terkait perubahan cuaca, gelombang, dan angin yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut menjadikan nelayan sebagai salah satu kelompok pekerja yang rentan terhadap kecelakaan kerja saat melaut. Bagi nelayan kecil yang umumnya menggunakan kapal berukuran terbatas, risiko tersebut menjadi semakin besar karena keterbatasan sarana keselamatan dan kemampuan kapal dalam menghadapi kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Oleh karena itu, aspek keselamatan kerja menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan kecil di Desa Karangsong (Solikhin dkk., 2017).

Permasalahan yang dihadapi nelayan kecil di desa Karangsong juga seperti pada temuan Wulandari dkk., (2023) hasil survei Koalisi KUSUKA tahun 2021 menunjukkan bahwa 82,08% nelayan kecil mengalami kesulitan mengakses subsidi BBM solar. Kesulitan tersebut disebabkan oleh persyaratan administrasi yang cukup panjang, nelayan yang belum tercatat dalam administrasi kapal, serta keterbatasan jumlah SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan).

Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan* sebagai landasan hukum untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, pemberdayaan nelayan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas nelayan. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan nelayan di Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Bentuk Pemberdayaan	Program/Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	BIDURI (Bandeng Cabut Duri)	Pelatihan keterampilan bandeng cabut duri	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu	Nelayan kecil dan Keluarga Nelayan
2.	Perlindungan Jaminan Sosial	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu	Nelayan kecil
3.	Peningkatan Kompetensi Nelayan	Pelatihan Sertifikasi Kecakapan di Bidang Keselamatan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nelayan dan warga pesisir
4.	Pengelolaan perikanan tangkap	Fasilitasi pendanaan dan bantuan pembiayaan usaha perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu	Nelayan kecil

*Sumber: diolah peneliti*

Perda tersebut secara jelas mengatur strategi perlindungan dan pemberdayaan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas usaha, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan dan perlindungan risiko usaha, namun, lemahnya implementasi dan kurangnya pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan perda ini membuat hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat nelayan di tingkat desa, oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian yang mendalami bagaimana bentuk, pelaksanaan, dan dampak pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya di Desa Karangsong, sebagai salah satu desa dengan kontribusi produksi ikan terbesar di Kabupaten Indramayu

Kesejahteraan nelayan merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kesejahteraan nelayan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau hasil tangkapan ikan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, fasilitas pendukung usaha, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya secara

berkelanjutan. Di Desa Karangsong, meskipun produksi ikan relatif melimpah, tingkat kesejahteraan nelayan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan pendidikan, minimnya pelatihan teknis dan manajemen usaha perikanan, serta kurangnya akses terhadap sumber daya pendukung seperti modal dan teknologi.

Pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan yang efektif meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan kelembagaan nelayan, serta penyediaan akses mudah terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dengan pemberdayaan yang tepat, nelayan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

Pemberdayaan nelayan juga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sosial masyarakat pesisir. Nelayan yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk mengelola usaha perikanan secara lebih profesional dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat secara signifikan dan risiko kemiskinan dapat diminimalisir. Program pemberdayaan nelayan menjadi langkah strategis yang harus dijalankan secara terintegrasi dan berkesinambungan agar hasil alam yang melimpah di Desa Karangsong dapat benar-benar memberi manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

Penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pelaksanaan pemberdayaan nelayan di Desa Karangsong. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang pemberdayaan nelayan, serta memberikan rekomendasi agar program-program yang ada dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat nelayan, dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Karangsong tidak hanya menjadi angka produksi semata, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pemberdayaan yang telah dilakukan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di latar belakang Pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Karangsong Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu, maka dapat diidentifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Angka kemiskinan nelayan di desa karangsong cukup tinggi, yaitu 46,15% nelayan di bawah garis kemiskinan.
2. Kesenjangan antara potensi sumber daya ikan yang melimpah dengan rendahnya kesejahteraan nelayan, menandakan bahwa proses pemberdayaan belum berhasil optimal.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan teknis nelayan di Desa Karangsong, sehingga nelayan kurang beradaptasi dengan perkembangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberdayaan serta faktor-faktor yang

mempengaruhi pemberdayaan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut di Desa Karangsong, maka dalam hal ini penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana proses pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dengan menggunakan teori Pemberdayaan masyarakat (5P) dari Edi Suharto.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari sisi penerapan praktis di lapangan dengan demikian

penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi terkait Implementasi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan, di Desa Karangsong dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kebijakan serta masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program, penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan studi Administrasi Publik khususnya yang berfokus pada kajian pemberdayaan masyarakat nelayan kecil, di Desa Karangsong, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat nelayan kecil dalam proses pemberdayaan yang bertujuan mensejahterakan nelayan kecil di Desa Karangsong diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Implementasi pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong. memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan. Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan ini, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan peluang yang tersedia. Hasil penelitian ini dapat

memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Karangsong. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas nelayan untuk menciptakan lingkungan baik yang lebih berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat nelayan kecil

Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai hak-hak dan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan, di Desa Karangsong. Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan nelayan terkait peluang ekonomi, teknologi modern dalam perikanan, serta praktik berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat nelayan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan bantuan dan program pemberdayaan dari pemerintah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang proses pemberdayaan nelayan. Manfaat untuk melatih penulis dalam menganalisis dampak pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini membantu pembaca memahami peran penting pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong. pembaca dapat mengetahui bagaimana kebijakan lokal di Kabupaten Indramayu dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan kecil. Ini termasuk memahami hak-hak nelayan, bentuk dukungan yang diberikan pemerintah, serta strategi untuk menghadapi tantangan yang ada.

## **1.6 Kajian Teori/Konsep**

### **1.6.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Mengacu pada berbagai literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang dalam penelitian ini, pemberdayaan masyarakat nelayan telah menjadi isu yang semakin penting dalam pembangunan berbasis komunitas, terutama dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Salah satu aspek paling krusial dalam proses pemberdayaan tersebut adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya dipahami dalam konteks formal di ruang kelas, tetapi juga dalam bentuk pendidikan non-formal, pelatihan keterampilan, transfer pengetahuan, dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat nelayan.

Pentingnya pelatihan yang bersifat adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi. Misalnya, pelatihan penggunaan teknologi GPS dan sistem informasi cuaca bagi nelayan kecil dinilai sangat membantu dalam

meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam melaut. Pendidikan lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam pelatihan masyarakat pesisir, agar mereka memiliki kesadaran untuk menjaga ekosistem laut demi keberlanjutan usaha mereka. Dalam hal ini, pemberdayaan berbasis pendidikan bukan hanya ditujukan untuk peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membangun sikap kritis, mandiri, dan berwawasan masa depan. Lebih rinci lagi Literatur yang berhubungan dengan penelitian antara lain, sebagai berikut:

**Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penelitian	Teori	Metode	Hasil
1.	<p><b>Peneliti:</b> A. Fahmi Zakariya (2020).</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Pemberdayaan Nelayan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan di Desa Karangagung</i></p>	<p>Membangun kekuatan ekonomi masyarakat nelayan di Desa Karangagung melalui kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pengolahan hasil tangkapan ikan oleh komunitas, terutama perempuan istri nelayan.</p>	<p><i>Pemberdayaan masyarakat</i> (Zubaedi, 2014; Sasano, 2008)</p> <p><i>Participatory Action Research (PAR):</i> Mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek (Kindon et al., 2007; Koch &amp; Krilik dalam Wahyuni, 2016).</p> <p><i>Ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat</i> (Machendrawati, 2001)</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan <i>Participatory Action Research (PAR)</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Desa Karangagung menghadapi berbagai persoalan, antara lain ketergantungan pada tengkulak dalam pemasaran ikan, harga yang tidak stabil, serta keterbatasan dalam pengolahan hasil tangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan mengalami kesulitan dalam mempertahankan penghasilan, terutama saat musim paceklik atau cuaca buruk. Melalui proses pemberdayaan yang melibatkan identifikasi masalah, pengembangan potensi lokal, serta pelatihan pengolahan hasil laut, masyarakat didorong untuk menciptakan inovasi ekonomi.</p>

2.	<p><b>Peneliti:</b> Lilik Suryani dkk., (2021).</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Participatory Empowerment of Capture Fisheries Collective Business Group (KUB) in Tungkan Pangeran Sub-District, Tanah Bumbu Regency</i></p>	<p>Menganalisis proses pemberdayaan partisipatif dalam kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu, serta hambatan dan keberhasilan pelaksanaannya.</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat (Martono, 2012; Mardikanto &amp; Soebiato, 2015),</p> <p>Pembelajaran Partisipatif (Sudjana, 2004)</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Tungkan Pangeran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anggota KUB belajar membuat produk olahan ikan seperti kerupuk, yang membantu mereka memperoleh keterampilan baru dan tambahan penghasilan. Kegiatan dilakukan secara bertahap, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan melibatkan anggota secara aktif. Program ini meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti membantu kebutuhan sehari-hari, namun masih ada kendala seperti kurangnya modal dan rendahnya partisipasi sebagian anggota.</p>
3	<p><b>Peneliti:</b> Natta Sanjaya, Sri Astuti Handayani (2025).</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Community Empowerment Strategy for</i></p>	<p>Menyusun strategi pemberdayaan bagi nelayan tradisional di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat: Berdasarkan Aprilia Theresia (2015), berfokus pada penguatan potensi masyarakat agar</p>	<p><i>Mixed Methods</i> (kombinasi kualitatif dan kuantitatif)</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Teluk belum berjalan optimal. Pemerintah desa dan dinas terkait belum mampu memaksimalkan potensi ekonomi masyarakat nelayan karena keterbatasan fasilitas, akses permodalan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan.</p>

	<i>Traditional Fishermen in Teluk Village Labuan Sub-District Pandeglang Regency</i>	masyarakat nelayan melalui pendekatan strategis berbasis pemberdayaan komunitas.	menjadi mandiri dan berdaya.		Pelatihan-pelatihan sudah dilakukan, namun belum merata dan tidak didukung pengawasan yang baik. Berdasarkan analisis SWOT, strategi utama yang direkomendasikan adalah WO Strategy yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan internal.
4.	<p><b>Peneliti:</b> Juliati Prihatini dkk., (2022).</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalam Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kelompok Nelayan pada Koperasi Teluk Lawasan Indah)</i></p>	Menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kelompok nelayan melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud, serta faktor pendukung dan penghambatnya, dengan fokus studi pada Koperasi Teluk Lawasan Indah.	Konsep Pemberdayaan oleh Mardikanto & Soebiato (2012), dengan empat indikator utama: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif	Pelaksanaan pemberdayaan berjalan melalui empat indikator. Pada Bina Manusia, dilakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penangkapan, pengelolaan, dan perawatan hasil tangkapan. Bina Usaha mencakup pemilihan komoditas (fokus pada ikan laut), manajemen usaha, akses modal, pengembangan kemitraan, dan sarana prasarana. Bina Lingkungan menekankan pelestarian alam, meskipun ditemukan pembuangan limbah ikan yang mencemari pantai. Dalam Bina Kelembagaan, koperasi berfungsi baik dengan aturan internal dan kesadaran anggota terhadap peran mereka.

					Faktor penghambat Rendahnya pendidikan dan penguasaan teknologi, Ketergantungan pada bantuan pemerintah, Sarana-prasarana yang belum memadai, Ketersediaan listrik yang terbatas Faktor Pendukung: Potensi alam laut yang melimpah, Dampak positif dari SKPT, Dukungan aktif dari pemerintah daerah
5.	<p><b>Peneliti:</b> Supriono dkk., (2021)</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Analisis Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah</i></p>	Meneliti pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Sulawesi Tengah, khususnya dalam pelaksanaan Program SULTENG TANGGUH.	Manajemen pemberdayaan masyarakat dengan fungsi-fungsi manajemen: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengawasan	Kualitatif deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Program SULTENG TANGGUH telah dilakukan secara optimal berdasarkan prinsip partisipatif. Proses pemberdayaan dimulai dari sosialisasi program, perencanaan bersama masyarakat, pengorganisasian sumber daya, hingga pelaksanaan program yang meliputi distribusi perahu dan mesin untuk nelayan terdampak bencana, penguatan komunitas pesisir, dan promosi pengetahuan lokal tentang kebencanaan.</p> <p>Faktor Pendukung meliputi dukungan masyarakat, fasilitator, dan</p>

					aparatus desa. Faktor Penghambat termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Evaluasi dilakukan tiap tahun selama 2018–2021 sebagai bagian dari siklus pelaksanaan program.
6.	<p><b>Peneliti:</b> Avif Alfiyah, Wardatul Karomah (2022).</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Pemberdayaan Nelayan Berbasis Interpreneurship: Pendampingan Masyarakat Buruh Nelayan</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pendampingan masyarakat buruh nelayan di Desa Kranji, Paciran, Lamongan untuk membangun jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) guna meningkatkan taraf ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada juragan (pemilik kapal), terutama saat musim paceklik.</p>	<p>Teori Kewirausahaan (Entrepreneurship) dengan referensi utama dari: Schumpeter: Wirausaha sebagai agen perubahan ekonomi melalui inovasi.</p>	<p>Menggunakan pendekatan PAR (Participatory Action Research): Keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Desa Kranji, khususnya buruh nelayan, masih mengalami berbagai kendala yang menghambat perkembangan ekonomi mereka. Salah satu permasalahan utama adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang menyebabkan minimnya pemahaman tentang kewirausahaan (entrepreneurship). Mayoritas nelayan memperoleh keterampilan secara turun-temurun dan belum memiliki kesadaran atau keinginan kuat untuk meningkatkan keterampilan atau mencari alternatif penghasilan di luar melaut.</p>
7.	<p><b>Peneliti:</b> Roslinawati (2021)</p> <p><b>Judul Penelitian:</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan</p>	<p>Konsep pemberdayaan sebagai kombinasi partisipasi, keadilan,</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini mengungkap bahwa program pemberdayaan yang dilakukan terhadap komunitas nelayan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, belum</p>

	<i>Empowerment of Fishing Community in Sociological Perspective</i>	Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utamanya adalah mengevaluasi ketidaksesuaian program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dengan kebutuhan riil nelayan.	kemandirian, dan jaringan sosial, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dari Waluyo (2006)		mampu menjawab kebutuhan riil para nelayan. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyediakan bantuan berupa perahu dan alat tangkap, upaya tersebut tidak disertai dengan pendampingan, pelatihan, ataupun peningkatan kapasitas nelayan. Sebagian besar nelayan di wilayah ini tergolong tradisional dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak hanya membutuhkan fasilitas fisik, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengelola hasil tangkapan, mengakses pasar, serta memanfaatkan peluang usaha lainnya.
8.	<b>Peneliti:</b> Rudi Dirgantara (2022) <b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowerment Strategy of Fishery Products as</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kota Tegal melalui pengolahan hasil perikanan sebagai daya tahan ekonomi. Fokusnya adalah	Konsep pemberdayaan masyarakat: upaya sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan melalui pelatihan,	Kualitatif	Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat pesisir di Kota Tegal, Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, khususnya dalam pengolahan hasil perikanan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan, teknologi,

	<i>Economic Resilience in the Coastal Marine</i>	bagaimana pemanfaatan produk kelautan dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.	pendampingan, dan pengembangan kapasitas		permodalan, serta manajemen usaha. Mayoritas pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih tergolong dalam skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum mampu meningkatkan nilai tambah produk secara maksimal dan bersaing di pasar yang lebih luas.
9.	<p><b>Peneliti:</b> Herlin Munthe dkk., (2024)</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowerment of Coastal Communities Through Sea Fish Processing in Improving The Economy of The Bumi Mangrove Forest Farmers and Fishermen Group Percut Village, Deli Serdang Regency</i></p>	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan kelompok nelayan dan petani hutan mangrove Bumi Mangrove di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, melalui pelatihan pengolahan ikan laut menjadi kerupuk, pelatihan manajemen usaha, serta pelatihan pemasaran digital. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir, terutama ibu-ibu rumah	Blue Economy sebagai latar belakang pengembangan potensi perikanan	Kualitatif, dengan pendekatan penagbdian masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi produk, keterampilan kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Faktor pendukung utama keberhasilan program ini adalah dukungan fasilitas, pelatihan yang terstruktur, dan semangat kolaboratif masyarakat. Sedangkan tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan bahan baku lokal dan perlunya pendampingan lanjutan untuk pengelolaan bisnis secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini berhasil menghidupkan kembali kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal, memperkuat

		tangga anggota kelompok nelayan			peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, serta memperkenalkan strategi pemasaran modern yang relevan dengan perkembangan zaman.
10.	<p><b>Peneliti:</b> Ahsan Mardjudo dkk., (2025)</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowerment of Small-Scale Fishermen in Labuan Salumbone Village, Labuan Sub-District Donggala District</i></p>	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan nelayan skala kecil di Desa Labuan Salumbone, khususnya melalui pelatihan pembuatan alat tangkap tradisional berupa bubu. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan nelayan agar mereka memiliki alternatif sumber pendapatan, terutama saat musim paceklik.	Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pendekatan keterampilan alternatif.	Pendekatan Aplikatif dengan pendekatan pengabdian masyarakat	Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan ini memberikan pengetahuan baru dan keterampilan teknis dalam memproduksi alat tangkap ikan secara mandiri. Kegiatan ini mendapat dukungan positif dari pemerintah desa dan masyarakat, serta menjadi model pelatihan produktif yang bisa dilanjutkan. Secara ekonomi, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.
11.	<p><b>Peneliti:</b> Aura Nazwa Sangko dkk., (2024)</p> <p><b>Judul Penelitian:</b> Strategi Pemberdayaan dalam Meningkatkan</p>	Penelitian ini berfokus pada efektivitas program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, terutama terkait ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian	Teori Efektivitas program	Kualitatif Deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala berupa rumitnya prosedur memperoleh kartu nelayan Kusuka serta keterbatasan akses bantuan bagi sebagian nelayan.

	Kesejahteraan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa	tujuan, dan pemantauan program.			
12.	<b>Peneliti:</b> Arisman dkk., (2021)  <b>Judul Penelitian:</b> <i>Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>	Fokus penelitian ini ada pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat nelayan, faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan, serta strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kelurahan Kolo	Pemberdayaan Masyarakat	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nelayan masih perlu ditingkatkan, terutama pendapatan dan taraf hidup, sementara kondisi sosial budaya masyarakat tergolong terbuka, gotong royong, dan menjunjung nilai agama serta adat. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan adalah usaha penangkapan ikan.
13.	<b>Peneliti:</b> Mulyadi dkk., (2023)  <b>Judul Penelitian:</b> <i>Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village:</i>	Memiliki fokus utama pada perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan penggarap di Desa	Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan	Metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum berjalan maksimal. Terdapat kontradiksi aturan mengenai status nelayan sebagai subjek hukum penerima perlindungan, selain itu, banyak nelayan penggarap belum memperoleh jaminan keselamatan

	<i>A Case Study of Legal Protection</i>	Pabeanudik, Kabupaten Indramayu.			kerja, asuransi, bantuan hukum, maupun pendampingan dari pemerintah daerah. Penelitian ini juga menemukan bahwa nelayan masih menghadapi persoalan utang kepada rentenir, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta lemahnya pembinaan sosial dari pemerintah.
14.	<b>Peneliti:</b> Selfidani dkk., (2024)  <b>Judul Penelitian:</b> <i>Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan</i>	Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kelompok nelayan diberdayakan melalui pengembangan sarana penangkapan, pelatihan, dan penguatan kapasitas masyarakat nelayan.	Konsep Pemberdayaan mengacu pada pemikiran Shardlow tentang pemberdayaan sebagai proses dan tujuan sosial.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kelompok nelayan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
15.	<b>Peneliti:</b> Michael Mamentu dkk., (2024)  <b>Judul Penelitian:</b> <i>Fisherman Empowerment</i>	Penelitian ini menyoroti mengapa berbagai program pemberdayaan pemerintah belum mampu meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat nelayan secara signifikan,	Teori pemberdayaan, mengacu pada konsep pemberdayaan Paul. Dan Teori Implementasi Kebijakan dari	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan nelayan gagal meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil karena masih kuatnya praktik nepotisme dan salah sasaran dalam pemberian bantuan. Banyak bantuan kapal, mesin, dan dana justru diberikan kepada nelayan besar atau masyarakat yang bukan nelayan

	<i>Program in Talaud Islands</i>	meskipun daerah tersebut memiliki potensi perikanan yang besar.	Van meter dan Van Horn		aktif. Akibatnya, sebagian besar kelompok nelayan tidak berkembang dan bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal.
--	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: *Diolah peneliti*, 2026.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakariya, (2020) dengan judul *"Pemberdayaan Nelayan dalam Membangun Kekuatan Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan di Desa Karangagung"* menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Zubaedi dan Sasano. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan menghadapi persoalan ketergantungan pada tengkulak, harga tidak stabil, serta keterbatasan pengolahan hasil tangkapan. Keterkaitannya dengan penelitian saya adalah adanya kesamaan subjek nelayan kecil dan problematika ketergantungan ekonomi, namun penelitian saya memiliki lokus yang berbeda yaitu di Desa Karangsong.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Suryani et al., (2021) berjudul *"Participatory Empowerment of Capture Fisheries Collective Business Group (KUB) in Tunggaran Pangeran Sub-District, Tanah Bumbu Regency"* menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dari Martono serta Mardikanto & Soebiato. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui KUB memberikan manfaat nyata dalam peningkatan keterampilan baru dan tambahan penghasilan bagi anggota, meskipun masih terkendala kurangnya modal. Penelitian saya memiliki kemiripan dalam mengkaji pemberdayaan kelompok nelayan, namun saya memperdalam analisis pada peran pendampingan di tingkat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Handayani, (2024) berjudul *"Community Empowerment Strategy for Traditional Fishermen in Teluk Village Labuan Sub-District Pandeglang Regency"* menggunakan

teori pemberdayaan dari Aprilia Theresia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberdayaan belum optimal karena keterbatasan fasilitas, akses permodalan, serta rendahnya pendidikan dan keterampilan. Kontribusi penelitian ini memberikan gambaran hambatan strategis yang juga menjadi latar belakang masalah dalam penelitian saya di Karangsong.

Penelitian yang dilakukan oleh Juliati Prihatini et al., (2022) berjudul *"Pemberdayaan Kelompok Nelayan Melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Desa Dalam Kecamatan Salibabu"* menggunakan konsep pemberdayaan Mardikanto & Soebiato melalui empat indikator utama. Hasil penelitian menunjukkan program berjalan melalui Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan, namun terhambat rendahnya pendidikan dan teknologi. Relevansinya terletak pada evaluasi program pemerintah, sementara penelitian saya lebih menyoroti aspek perlindungan bagi nelayan kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriono et al., (2022) berjudul *"Analisis Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Kantor Perwakilan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Sulawesi Tengah"* menggunakan fungsi-fungsi manajemen pemberdayaan. Hasilnya menunjukkan pengelolaan program SULTENG TANGGUH dilakukan secara optimal berdasarkan prinsip partisipatif mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Persamaannya adalah fokus pada manajemen pemberdayaan, namun penelitian saya meninjau keberlanjutan program di lingkungan sentra perikanan yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah & Karomah, (2022) berjudul *"Pemberdayaan Nelayan Berbasis Interpreneurship: Pendampingan Masyarakat Buruh Nelayan"* menggunakan teori kewirausahaan Schumpeter. Hasil penelitian menunjukkan buruh nelayan masih mengalami kendala ekonomi akibat rendahnya pendidikan dan minimnya pemahaman tentang kewirausahaan. Keterkaitannya adalah kesamaan masalah pendidikan rendah di Karangsong, namun penelitian saya lebih berfokus pada peran kebijakan dalam memungkinkan akses nelayan.

Penelitian yang dilakukan oleh Roslinawati, (2021) berjudul *"Empowerment of Fishing Community in Sociological Perspective"* menggunakan konsep pemberdayaan sebagai kombinasi partisipasi dan kemandirian. Hasilnya mengungkap bahwa program bantuan fisik seringkali tidak disertai dengan pendampingan atau peningkatan kapasitas sehingga tidak menjawab kebutuhan riil nelayan. Fenomena ketidaksesuaian ini selaras dengan kondisi di Karangsong yang menjadi salah satu titik fokus dalam penelitian saya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dirgantara, (2022) berjudul *"Empowerment Strategy of Fishery Products as Economic Resilience in the Coastal Marine"* menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan potensi besar pengolahan hasil laut di Kota Tegal belum optimal karena kendala pengetahuan, teknologi, dan permodalan. Relevansinya adalah pada upaya penguatan ekonomi, sementara penelitian saya mengutamakan aspek

perlindungan nelayan dari kerentanan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlin Munthe et al., (2024) berjudul *"Empowerment of Coastal Communities Through Sea Fish Processing in Improving The Economy"* menggunakan latar belakang *Blue Economy*. Hasilnya menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran inovasi produk dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan pemasaran digital. Penelitian saya juga mengamati peran motivasi dan faktor internal nelayan sebagai pendukung kemandirian ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardjudo dkk., (2025) berjudul *"Empowerment of Small-Scale Fishermen in Labuan Salumbone Village"* menggunakan pendekatan keterampilan alternatif bagi nelayan. Hasilnya menunjukkan kegiatan pelatihan pembuatan alat tangkap mandiri memberikan pengetahuan teknik baru yang membantu ketahanan ekonomi nelayan saat paceklik. Persamaannya adalah fokus pada nelayan skala kecil, namun penelitian saya memperluas cakupan pada adaptasi terhadap kebijakan modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Aura dkk., (2024) berjudul *"Strategi Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Ponosakan Belang"* menggunakan teori efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan program sudah berjalan cukup baik namun masih terkendala rumitnya prosedur administrasi bantuan. Hal ini identik dengan kendala literasi digital di Karangsong yang saya bahas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Arisman dkk., (2021) berjudul *"Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kelurahan Kolo"* menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat secara deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pemberdayaan adalah usaha penangkapan ikan serta kondisi sosial budaya yang menjunjung nilai gotong royong. Keterkaitannya adalah pada pemetaan faktor internal yang juga saya gunakan sebagai instrumen analisis.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mulyadi dkk., (2023) berjudul *"Empowerment of the Fishermen Community in Pabeanudik Village: A Case Study of Legal Protection"* menggunakan konsep perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Hasilnya menunjukkan perlindungan belum maksimal karena adanya kontradiksi aturan dan lemahnya jaminan keselamatan kerja bagi nelayan penggarap. Karena lokusnya bertetangga dengan Desa Karangsong, penelitian ini menjadi dasar kuat bagi saya untuk mengkaji aspek perlindungan hukum secara lebih mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Selfidani dkk., 2024) berjudul *"Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Pendapatan"* menggunakan konsep pemberdayaan Sharrow sebagai proses sosial. Hasil penelitian menunjukkan kelompok nelayan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan pendapatan. Persamaannya adalah fokus pada peran kelompok nelayan, sementara penelitian saya mengevaluasi sejauh mana partisipasi di dalam kelompok tersebut dapat merata.

Penelitian yang dilakukan oleh Mamentu et al., (2023) berjudul "*Fisherman Empowerment Program in Talaud Islands*" menggunakan teori pemberdayaan Paul serta implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian menyimpulkan kegagalan program meningkatkan kesejahteraan karena praktik nepotisme dan salah sasaran bantuan. Temuan ini menjadi referensi penting bagi saya untuk mengidentifikasi faktor eksternal penghambat pemberdayaan di Desa Karangsong.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian saya memiliki beberapa kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini menggunakan Teori Pemberdayaan Edi Suharto (5P) untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat nelayan kecil (5 GT) di Desa Karangsong. Fokus analisis meliputi Pemungkinan dalam menciptakan akses sumber daya, Penguatan kapasitas dan kemandirian, Perlindungan dari praktik tidak adil, Penyokongan melalui bimbingan sistematis, serta Pemeliharaan untuk menjaga kesinambungan program. Penelitian ini dikombinasikan dengan Teori Faktor Pemberdayaan dari Mardikanto & Soebianto (2013). Hal ini bertujuan untuk membedah variabel internal seperti motivasi dan kesadaran masyarakat nelayan dalam mengembangkan potensi diri, serta variabel eksternal seperti efektivitas kebijakan pemerintah dan peran fasilitator dalam merespons permasalahan nyata di lapangan, termasuk kendala literasi digital terkait penggunaan aplikasi bahan bakar subsidi, dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dalam melihat dinamika pemberdayaan

nelayan di tingkat lokal. Pemilihan lokasi ini adalah karena Desa Karangsong merupakan sentra produksi perikanan laut terbesar di Jawa Barat dengan aktivitas pelabuhan yang sangat tinggi, namun di sisi lain masih menghadapi kontradiksi sosial berupa kesenjangan ekonomi yang nyata bagi nelayan kecil (5 GT). okasi ini menawarkan kompleksitas masalah pemberdayaan yang unik, mulai dari tingginya ketergantungan pada tengkulak hingga dinamika adaptasi teknologi di tengah arus modernisasi pelabuhan yang belum dibahas secara mendalam oleh penelitian-penelitian terdahulu di lokasi lain. Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan menyeluruh dalam melihat dinamika pemberdayaan nelayan di tingkat lokal yang strategis.

## **1.6.2 Administrasi Publik**

### **1.6.2.1 Definisi Administrasi Publik**

Administrasi didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dan dinamis, memanfaatkan sumber daya perusahaan, orang, dan bahan melalui kerjasama dan koordinasi (Donovan dan Jackson, 1991:10). Seperti yang dijelaskan oleh Chandler dan Plano (1988), administrasi publik adalah penggunaan personel dan sumber daya publik yang dikoordinasikan untuk melaksanakan rangkaian proses formulasi, implementasi, atau pengelolaan keputusan terkait kebijakan publik.

Dalam praktiknya, administrasi publik sering kali dipahami secara berbeda-beda oleh para ahli, tergantung dari sudut pandang dan

pendekatan yang digunakan. McCurdy (dalam Keban, 2018:3) menjelaskan bahwa administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan teknis pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari proses politik yang sangat penting. Artinya, administrasi publik dapat dianggap sebagai suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Lebih jauh lagi, administrasi publik juga dipahami sebagai cara yang bersifat prinsipil dan mendasar dalam mengatur serta menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti pelayanan publik, pembuatan kebijakan, hingga pengelolaan sumber daya negara, sementara itu Dimock dan Fox (dalam Keban, 2018:5) melihat administrasi publik dari perspektif yang lebih menekankan pada peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut mereka, administrasi publik adalah suatu bentuk pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsumen, yang diwujudkan melalui perencanaan dan penyediaan barang serta jasa yang dibutuhkan publik. Dalam konteks ini, administrasi publik berperan layaknya manajemen pelayanan, di mana pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan yang berupaya merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara efisien dan tepat sasaran.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal melalui kerja sama dan

koordinasi. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam pemerintahan, tetapi juga mencakup dimensi politik dan sosial, terutama dalam hal pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik juga memiliki peran penting sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat, di mana pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan publik melalui penyediaan barang dan jasa secara efisien. Dengan demikian, administrasi publik menjadi elemen yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

#### **1.6.2.2 Pergeseran Paradigma Administrasi Publik**

Paradigma merupakan konsep fundamental yang berfungsi sebagai kerangka berpikir atau pola dasar dalam memahami dan menilai suatu fenomena. Menurut para ahli, paradigma adalah sekumpulan asumsi, nilai, dan keyakinan yang saling terkait dan membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas. C. J. Ritzer menyatakan bahwa paradigma adalah acuan filosofis yang menjadi dasar dalam melaksanakan suatu tujuan atau motif. Sementara itu, Thomas Kuhn memandang paradigma sebagai landasan berpikir yang digunakan ilmuwan sebagai model dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Dalam setiap pengetahuan pasti akan mengalami sebuah krisis atau fenomena sehingga munculnya pandangan baru yang lebih relevan dan akan muncul paradigma baru.

Menurut pandangan Robert T. Golembiewski, yang dikutip dalam karya Yeremias T. Keban (2008), suatu disiplin ilmu memiliki standar tertentu yang dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu *focus* dan *locus*. Kedua konsep ini menjadi fondasi dalam memahami dan mengembangkan identitas serta keunikan dari sebuah bidang keilmuan. *Focus* merujuk pada metode dasar, pendekatan teoritis, atau seperangkat teknik analisis yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menyelesaikan suatu masalah. Fokus ini menjadi ciri khas dari disiplin tersebut dan membedakannya dari disiplin ilmu lainnya. Sementara itu, *locus* mengacu pada konteks atau lokasi dimana metode atau pendekatan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, locus menggambarkan wilayah atau ruang lingkup masalah-masalah yang ditangani oleh ilmu tersebut dalam praktik nyata. Berdasarkan disiplin yang sudah dijelaskan, muncul beberapa paradigma dasar dalam ilmu administrasi publik:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926)  
Dikembangkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, paradigma ini menekankan pemisahan antara ranah politik dan administrasi. Politik berperan dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kehendak masyarakat, sementara administrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut secara teknis dan profesional, tanpa campur tangan politik.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Diprakarsai oleh tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, paradigma ini mengedepankan prinsip-prinsip dasar administrasi publik yang dipengaruhi oleh teori manajemen. Salah satu bentuk konkret dari prinsip ini dirumuskan dalam konsep POSDCORB: Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (penyusunan staf), Directing (pengarahan), Coordinating (koordinasi), Reporting (pelaporan), dan Budgeting (penganggaran).

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Pada masa ini, administrasi publik dipandang sebagai cabang dari ilmu politik. Disadari bahwa administrasi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai politik, sehingga muncul pandangan bahwa administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik. Fokus utama berada pada birokrasi pemerintah, namun pendekatannya masih belum memiliki kejelasan karena banyak prinsip administrasi yang dinilai kurang kokoh secara teori.

4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970)

Paradigma ini berupaya mengembangkan administrasi publik sebagai disiplin ilmiah yang berdiri sendiri. Pendekatannya

mulai mengandalkan teori dan metode ilmiah, termasuk dukungan dari ilmu psikologi sosial. Fokus utamanya adalah pada kebijakan publik, baik dalam konteks sektor bisnis maupun pemerintahan. Namun, perluasan fokus ke berbagai sektor membuat batas lokus kajian menjadi kurang tegas. 5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Paradigma ini membawa kejelasan baik dari segi fokus maupun lokusnya. Fokusnya mencakup kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen, sementara lokusnya terletak pada isu-isu serta kepentingan publik. Artinya, administrasi publik diposisikan sebagai bidang yang unik dan memiliki otonomi keilmuan.

5. Paradigma Administrasi Publik, sejak tahun 1970, administrasi negara mulai berkembang dengan menempatkannya sebagai disiplin ilmu tersendiri. Perkembangannya tidak hanya berfokus pada posisi administrasi negara sebagai ilmu murni, tetapi juga mencakup pengembangan teori-teori organisasi.
6. Paradigma Governance (Tata Kelola Pemerintahan) menurut Stoker (1998) Stoker menyatakan bahwa konsep governance mencerminkan perubahan dalam praktik pemerintahan, di mana batas antara sektor publik dan privat menjadi semakin kabur. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah sosial dan

ekonomi. Sebaliknya, diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, *governance* menekankan pentingnya hubungan jaringan antar lembaga yang saling bergantung, serta perlunya fleksibilitas dan kemampuan adaptif dalam menghadapi kompleksitas isu-isu publik.

Dari beberapa paradigma administrasi publik, penelitian ini menggunakan paradigma Administrasi Publik keenam, yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance* atau tata kelola pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Stoker (1998) menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pemerintah menjalankan perannya. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah sosial dan ekonomi. Sebaliknya, *governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Governance* juga menuntut adanya jaringan kerja yang saling bergantung dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika serta kompleksitas isu-isu publik. Paradigma ini sejalan dengan konteks pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu. Dalam proses pemberdayaan tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya berpusat pada intervensi pemerintah secara sepihak, melainkan

melibatkan partisipasi aktif dari berbagai unsur masyarakat. Pemerintah desa lebih berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi dan kerja sama antar pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang diterapkan di desa tersebut telah mengarah pada pola yang partisipatif dan kolaboratif, sesuai dengan prinsip-prinsip governance. Dengan demikian, paradigma governance memberikan kerangka yang relevan dalam memahami dinamika pemberdayaan masyarakat nelayan di tingkat lokal, khususnya dalam menciptakan proses yang inklusif, terbuka, dan berkelanjutan.

### **1.6.3 Manajemen Publik**

#### **1.6.3.1 Definisi Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan sebuah kajian multidisipliner yang berkembang dari perpaduan berbagai ilmu, seperti manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik. Kajian ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan teknis organisasi, tetapi juga mencakup aspek kebijakan dan nilai-nilai publik yang mendasarinya. Dalam pandangan Overman (dalam Widanti, 2023), manajemen publik bukanlah semata-mata bentuk dari manajemen ilmiah atau hanya perluasan dari administrasi publik, melainkan mencerminkan perpaduan antara pendekatan rasional yang menekankan efisiensi dengan pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan aspek politik dalam pengambilan keputusan publik.

Tujuan dari manajemen publik adalah mengatur dan mengelola organisasi publik agar dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, dan infrastruktur, untuk mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajemen publik, dalam hal ini, menjadi wadah bagi proses pengambilan keputusan yang terarah dan terorganisir dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Beberapa ahli turut memberikan pandangannya mengenai manajemen publik. Sharfitz dan Russel (dalam Keban, 2014) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sementara itu, Suradinata (dalam Anggara, 2016) mengartikan manajemen publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna merealisasikan tujuan bangsa melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pandangan lain datang dari Pasolong (dalam Widanti, 2023), yang melihat manajemen publik sebagai bentuk pengelolaan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya secara terarah.

Ciri khas dari manajemen publik terletak pada orientasinya terhadap pelayanan masyarakat, berbeda dengan sektor swasta yang

berfokus pada keuntungan. Selain itu, manajemen publik juga berperan dalam mengatur alokasi sumber daya, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program pemerintahan. Dalam praktiknya, manajemen publik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan demikian, manajemen publik dapat dimaknai sebagai suatu proses sistematis yang dilakukan pemerintah untuk mengelola sektor publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan memastikan pemanfaatan sumber daya publik secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan.

#### **1.6.4 Pemberdayaan Masyarakat**

Secara empirik, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*), dan melindungi (*protecting*). (Arifin, 2000:94 dalam Falihah, 2007:38).

Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996) dalam Amalia (2008:41), konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana

kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

#### **1.6.5 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Administrasi publik, sebagai bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan, memiliki peran yang sangat vital dalam suatu negara, khususnya dalam hal pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Frederick A. Cleveland (dalam Keban, 2014:15-16), administrasi publik memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat serta penguatan demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi publik harus dilakukan secara efektif melalui berbagai upaya seperti inovasi, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas, desentralisasi, pelayanan yang optimal, serta penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta.

Dalam wacana pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan kerap dikaitkan dengan kemandirian, partisipasi aktif, jaringan kerja, serta prinsip keadilan. Secara umum, pemberdayaan menitikberatkan pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok sosial. Hikmat (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai pemahaman seseorang secara psikologis mengenai sejauh mana ia memiliki kontrol atas kondisi sosial, kekuasaan politik, serta hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Sementara itu, menurut Suharto (2005), pemberdayaan merujuk pada upaya meningkatkan kemampuan individu, terutama bagi kelompok yang lemah dan rentan, agar mereka memiliki daya atau kekuatan dalam beberapa aspek, yaitu: (a) mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang pada akhirnya memberi kebebasan, tidak hanya dalam menyampaikan pendapat tetapi juga terbebas dari kelaparan, kebodohan, dan penyakit; (b) memiliki akses terhadap sumber daya produktif untuk meningkatkan penghasilan dan memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan; dan (c) ikut serta dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat nelayan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang dimiliki. Pemberdayaan ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, motivasi, serta fasilitas yang mendukung agar nelayan dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri dan

berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan juga diarahkan untuk memperkuat posisi tawar nelayan dalam aspek sosial dan ekonomi sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan melalui peraturan yang mendukung. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup nelayan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Suhendra, 2006; Suryana, 2018).

Dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat terjadi ketika warga secara sukarela memulai dan menjalankan aktivitas sosial untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Keberhasilan dari upaya pemberdayaan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Oleh karena itu, inti dari pemberdayaan mencakup keterlibatan dalam pembangunan, tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat, serta upaya mandiri untuk menciptakan perubahan positif. Dengan demikian, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak pelaksana, tetapi juga oleh tingkat keaktifan masyarakat yang menjadi sasaran dalam mengambil bagian dan berkontribusi terhadap perbaikan kondisi mereka sendiri (Maryani, 2019: 8).

Sumodiningrat (dalam Mardikanto, 2017:29) mengatakan bahwasanya pemberdayaan ialah usaha guna menciptakan peluang dan atau

memfasilitasi kelompok miskin pada sumber daya berupa teknologi, modal, jaminan pemasaran, informasi, dll. Tujuannya ialah untuk memajukan dan mengembangkan usaha sehingga dapat memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan guna kesejahteraan. Upaya penguatan pemberdayaan masyarakat bisa dicermati dalam 3 bahasan berikutnya:

1. Menciptakan kondisi ataupun iklim yang menjadikan berkembangnya potensi masyarakat (enebling). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwasanya tiap individu mempunyai potensinya masing-masing yang bisa mereka kembangkan. Sehingga, pemberdayaan ialah usaha guna memotivasi, menumbuhkan rasa sadar akan potensi diri serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Menguatkan potensi ataupun daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowerment). Langkah ini ialah tindak lanjut dari pembentukan kondisi dan iklim untuk berkembang. Strategi ini dilaksanakan melalui penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Upaya yang dilakukan ialah membangun fasilitas pokok guna mengoptimalkan layanan pada beragam sumber pembangunan perekonomian berupa teknologi, modal, lapangan kerja, pengetahuan, serta pasar.

3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Pada aktivitas pemberdayaan, diharuskan adanya upaya pencegahan yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Sehingga, pada konsep pemberdayaan, perlindungan dan pemihakan kepada kelompok rentan ialah hal yang fundamental.

Di dalam mencari jawaban penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu ini, peneliti menggunakan metode yang di sampaikan oleh Edi Suharto (1997), mengemukakan konsep pemberdayaan yang bersifat holistik dengan memilahnya ke dalam lima dimensi atau elemen utama yang dikenal sebagai 5P, yaitu Pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empowering*), Perlindungan (*Protecting*), Penyokongan (*Supporting*), dan Pemeliharaan (*maintaining*). Konsep ini sangat aplikatif dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menjadi kelompok rentan namun memiliki potensi strategis dalam pembangunan daerah pesisir.

1. Pemungkinan (*Enabling*), *Pemungkinan berperan dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung pengembangan kapasitas nelayan secara maksimal. Hal ini meliputi usaha membuka peluang akses sumber daya, pelatihan teknis, dan kemudahan pemasaran hasil tangkapan ikan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.*

2. Penguatan (*Empowering*), Penguatan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam mengelola usaha perikanan. Pemberdayaan dalam aspek ini diharapkan menjadikan nelayan lebih mandiri dan mampu mengatasi kendala yang dihadapi tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal.
3. Perlindungan (*Protecting*), Perlindungan memberikan perhatian pada aspek keadilan sosial dengan memastikan nelayan terlindungi dari tekanan eksploitasi, praktik tidak adil, dan dominasi oleh pihak yang lebih kuat, seperti tengkulak atau penguasa pasar. Perlindungan ini bertujuan menciptakan kondisi yang adil dan berkelanjutan bagi eksistensi dan pendapatan nelayan.
4. Penyokoangan (*Supporting*), Penyokongan mencakup pemberian dukungan teknis dan non teknis yang sistematis, berupa pendampingan, fasilitasi kebijakan, dan bimbingan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemberdayaan. Fungsi ini sangat penting untuk membantu nelayan agar mampu berpartisipasi aktif dan optimal dalam berbagai program pembangunan yang menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

5. Pemeliharaan (*Maintaining*), Pemeliharaan menekankan pada keberlanjutan pemberdayaan dengan menjaga kesinambungan upaya penguatan nelayan agar dapat terus berkembang secara konsisten. Aspek ini juga mencakup perhatian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan pesisir sebagai modal utama kegiatan perikanan.

Teori 5P pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto (1997) sangat tepat dijadikan landasan dalam penelitian pemberdayaan masyarakat nelayan karena teori ini memberikan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensi. Teori ini tidak hanya menekankan pada aspek peningkatan kapasitas nelayan, tetapi juga memperhatikan perlindungan, dukungan, dan keberlanjutan yang merupakan kebutuhan fundamental dalam konteks masyarakat pesisir yang rentan terhadap berbagai tekanan sosial-ekonomi dan lingkungan. Pendekatan ini memosisikan masyarakat nelayan sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan, sehingga tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, melainkan sebagai agen yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Menurut Chambers (1995), pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan seperti nelayan tradisional, agar mampu mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat menjadi komponen penting, sebab tanpa partisipasi langsung,

pemberdayaan hanya akan menjadi inisiatif eksternal yang tidak berakar pada kebutuhan dan kondisi lokal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mubyarto (1991) menyatakan bahwa proses pemberdayaan harus melibatkan masyarakat secara aktif agar mereka tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan. Keberhasilan program pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan sangat bergantung pada sejauh mana mereka ikut serta dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program tersebut.

#### **1.6.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan**

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013) dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, terdapat beberapa faktor utama yang bisa mendorong maupun menghambat keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

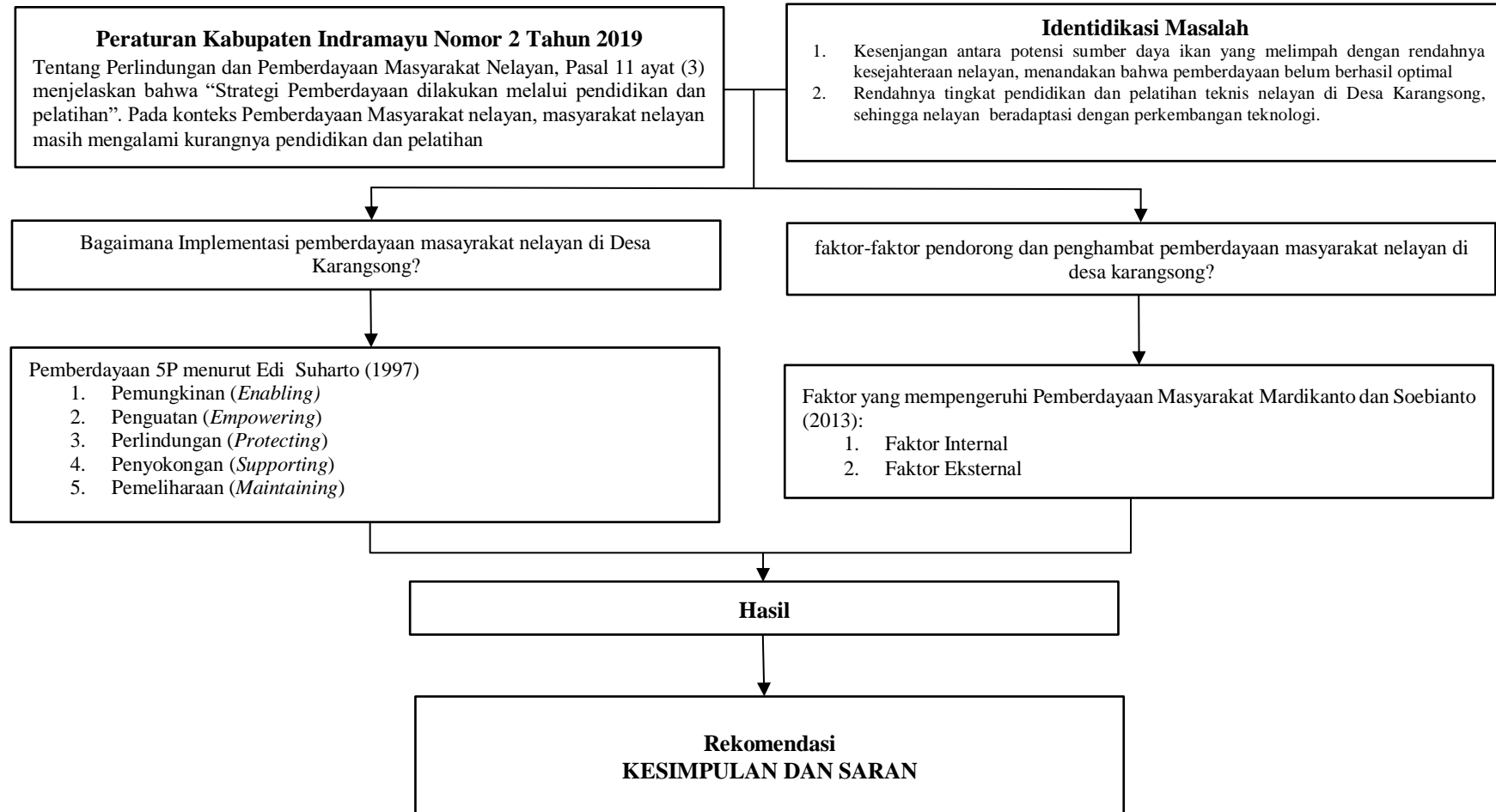
1. Faktor Internal, a) Motivasi Masyarakat Ini merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan. Masyarakat perlu memiliki kemauan dan kesadaran untuk mengubah kondisi hidup mereka sendiri. Tanpa hal ini, program pemberdayaan tidak akan berjalan efektif. b) Potensi dan Kemampuan Masyarakat, Masyarakat memiliki berbagai potensi dan keterampilan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus berfokus pada penggalian dan pengembangan kemampuan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan mereka. c) Modal Sosial, Modal sosial seperti

kepercayaan, nilai-nilai, dan norma positif memiliki peran penting sebagai kekuatan pemersatu yang mendukung kolaborasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

2. Faktor Eksternal a) Kebijakan Pemerintah, Dukungan kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sangat penting dalam mendorong proses pemberdayaan. Dukungan ini dapat berbentuk regulasi, program-program strategis, serta alokasi anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. b) Peran Fasilitator pendamping, Fasilitator atau pendamping masyarakat memiliki peranan krusial dalam mendampingi proses pemberdayaan. Mereka perlu memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mendampingi masyarakat dalam mengenali permasalahan, merumuskan solusi, serta melaksanakan tindakan yang tepat. c) Akses terhadap sumber daya, Keberhasilan pemberdayaan juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut bisa meliputi sumber daya alam, tenaga manusia, maupun pembiayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.7 Kerangka Berpikir

### 1.7.1 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah peneliti, 2026.

## **1.8 Operasionalisasi Konsep**

### **1.8.1 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu**

Untuk memperoleh batasan yang jelas, penulis menyederhanakan pemikiran mengenai permasalahan yang akan diteliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu ini mengacu pada teori Edi Suharto (1997) yang memiliki 5 dimensi yang disebut dengan 5 P, yaitu: Pemungkinan (*Enabling*), Penguatan (*Empowering*), Perlindungan (*Protecting*), Penyokongan (*Supporting*), Pemeliharaan (*Maintaining*). Teori Edi Suharto terkait Pemberdayaan nelayan ini relevan digunakan karena memberikakan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan kecil. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dan/atau dinas terkait dalam memberdayakan masyarakat nelayan di lokasi penelitian. Pemberdayaan masyarakat nelayan kecil dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Pemungkinan (*Enabling*)**

Pemungkinan dalam penelitian ini diartikan sebagai peran pemerintah dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat nelayan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini dilihat dari adanya program pemberdayaan yang dirancang khusus untuk nelayan, keterbukaan akses informasi mengenai bantuan dan pelatihan, serta keterlibatan nelayan dalam proses perencanaan kegiatan. Pemungkinan juga mencakup bagaimana pemerintah membuka ruang partisipasi bagi nelayan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.

#### **2. Penguatan (*Empowering*)**

Penguatan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam

mengelola usaha perikanan. Penelitian ini, penguatan dilihat dari pelaksanaan pelatihan keterampilan (seperti pengolahan hasil tangkapan atau manajemen usaha), pemberian bantuan sarana dan prasarana, serta peningkatan kemampuan nelayan dalam mengelola usaha perikanan. Dimensi ini juga mencerminkan sejauh mana program yang diberikan benar-benar meningkatkan kemampuan dan produktivitas nelayan.

### 3. Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan memberikan perhatian pada aspek keadilan sosial dengan memastikan nelayan terlindungi dari tekanan eksploitasi, praktik tidak adil, dan dominasi oleh pihak yang lebih kuat, seperti tengkulak atau penguasa pasar. Perlindungan ini bertujuan menciptakan kondisi yang adil dan berkelanjutan bagi eksistensi dan pendapatan nelayan. Perlindungan juga meliputi adanya jaminan atau asuransi nelayan, bantuan saat terjadi cuaca ekstrem atau kondisi darurat, serta kebijakan yang melindungi nelayan kecil dari persaingan yang tidak seimbang. Dimensi ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah hadir dalam memberikan rasa aman kepada nelayan.

### 4. Penyokoangan (*Supporting*)

Penyokoangan mencakup pemberian dukungan teknis dan non teknis yang sistematis, berupa pendampingan, fasilitasi kebijakan, dan bimbingan dalam perencanaan serta pelaksanaan program pemberdayaan. Fungsi ini sangat penting untuk membantu nelayan agar mampu berpartisipasi aktif dan optimal dalam berbagai program pembangunan yang menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

### 5. Pemeliharaan (*Maintaining*)

Pemeliharaan menekankan pada keberlanjutan pemberdayaan dengan menjaga kesinambungan upaya penguatan nelayan agar dapat terus berkembang secara konsisten. Aspek ini juga mencakup perhatian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan pesisir sebagai modal utama kegiatan perikanan.

### **1.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kecil di Desa Karangsong**

Pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) lingkungan nelayan. Faktor-faktor ini sangat menentukan sejauh mana proses pemberdayaan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan kecil ini mengacu pada Mardikanto dan Soebianto (2013), Penjelasan dari Faktor yang mempengaruhi, sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

- 1) Keinginan dan Kesadaran Masyarakat, Ini merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan. Masyarakat perlu memiliki kemauan dan kesadaran untuk mengubah kondisi hidup mereka sendiri. Tanpa hal ini, program pemberdayaan tidak akan berjalan efektif.
- 2) Potensi dan Kemampuan Masyarakat, Masyarakat memiliki berbagai potensi dan keterampilan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus berfokus pada penggalan dan pengembangan kemampuan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 3) Modal Sosial yang Tersedia, Modal sosial seperti kepercayaan, nilai-

nilai, dan norma positif memiliki peran penting sebagai kekuatan pemersatu yang mendukung kolaborasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

## 2. Faktor Eksternal

- 1) Kebijakan Pemerintah, Dukungan kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat sangat penting dalam mendorong proses pemberdayaan. Dukungan ini dapat berbentuk regulasi, program-program strategis, serta alokasi anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
- 2) Peran Fasilitator dan Pendamping, Fasilitator atau pendamping masyarakat memiliki peranan krusial dalam mendampingi proses pemberdayaan. Mereka perlu memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mendampingi masyarakat dalam mengenali permasalahan, merumuskan solusi, serta melaksanakan tindakan yang tepat.
- 3) Akses Terhadap Sumber Daya, Keberhasilan pemberdayaan juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan. Sumber daya tersebut bisa meliputi sumber daya alam, tenaga manusia, maupun pembiayaan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang diambil, dapat disimpulkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada indikator yang diambil sebagai fenomena penelitian terkait Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Nelayan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu.

### 1.8.3 Nelayan Kecil 5 GT (*Gross Tonnage*)

Nelayan kecil merupakan nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan sarana dan prasarana yang terbatas, terutama ditinjau dari ukuran kapal, teknologi penangkapan, modal usaha, serta jangkauan wilayah operasi penangkapan. Dalam kajiannya, mereka menyatakan bahwa ukuran kapal kurang dari 5 GT lebih mencerminkan karakteristik nelayan kecil karena memiliki keterbatasan teknologi, kapasitas produksi, dan kemampuan ekonomi dibandingkan kapal berukuran lebih besar (Pramoda dkk, 2019).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa nelayan kecil adalah kelompok nelayan yang menjalankan usaha penangkapan ikan dalam skala terbatas dengan modal, teknologi, dan kapasitas produksi yang relatif rendah sehingga sangat bergantung pada kondisi sumber daya perikanan dan dukungan pemerintah.

Gross Tonnage (GT) merupakan satuan yang digunakan untuk menunjukkan ukuran atau volume keseluruhan ruang kapal. GT bukan menunjukkan berat kapal, melainkan kapasitas atau besarnya kapal. Semakin besar nilai GT, semakin besar pula kapasitas muatan, jangkauan operasi, dan kemampuan produksi kapal tersebut. Dalam konteks nelayan kecil, kapal yang digunakan dibatasi maksimal 10 GT sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Ton (GT).

Nelayan kecil adalah individu yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT atau tanpa menggunakan kapal. Dalam penelitian ini, nelayan kecil dipahami sebagai nelayan yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan kapasitas usaha sehingga memerlukan dukungan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tersebut, nelayan kecil tidak hanya dibedakan berdasarkan ukuran kapal yang digunakan, tetapi juga memiliki karakteristik tertentu yang mencerminkan skala usaha dan kondisi sosial ekonominya. Adapun karakteristik nelayan kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki modal usaha yang terbatas.
- b. Menggunakan alat tangkap dan teknologi penangkapan yang sederhana.
- c. Mengoperasikan kapal berukuran kecil (maksimal 10 GT).
- d. Memiliki jangkauan operasi penangkapan yang relatif terbatas.
- e. Pendapatan bergantung pada musim dan kondisi cuaca.
- f. Produktivitas usaha penangkapan relatif rendah dibandingkan nelayan skala besar.
- g. Memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan informasi.
- h. Memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi terhadap perubahan kondisi sumber daya perikanan dan lingkungan.

**Tabel 1. 6 Operasional Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan**

**Masyarakat**

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diaamti	Sub Gejala
1.	Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 5P Edi Suharto, (1997)	Pemungkinan <i>(Enabling)</i>	Terbukanya kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan taraf kehidupannya melalui berbagai dukungan dan akses yang tersedia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya Pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan</li> <li>2. Masalah Individu dan kelompok masyarakat yang di hadapi</li> <li>3. Akses Informasi terkait pemberdayaan nelayan</li> </ol>
		Penguatan <i>(Empowering)</i>	Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat nelayan dalam mengelola potensi dan usaha yang dimiliki secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis program peningkatan kapasitas nelayan</li> <li>2. Kesiapan nelayan terhadap program</li> <li>3. Aspek yang perlu diperkuat.</li> </ol>

		<p>Perlindungan <i>(Protecting)</i></p>	<p>Adanya upaya melindungi masyarakat nelayan dari kondisi kerentanan sosial dan ekonomi dalam menjalankan aktivitas perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari penyebab timbulnya masalah di nelayan</li> <li>2. Peran pemerintah dalam mengatasi masalah nelayan kecil</li> <li>3. Perlindungan yang paling penring bagi nelayan</li> </ol>
		<p>Penyokongan <i>(Supporting)</i></p>	<p>Adanya dukungan dan pendampingan yang membantu masyarakat nelayan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan yang diberikan pemerintah</li> <li>2. Dukungan yang dibutuhkan nelayan kecil</li> <li>3. Efektivitas dukungan kepada nelayan kecil</li> </ol>

		Pemeliharaan ( <i>Maintaining</i> )	Adanya upaya menjaga keberlanjutan kegiatan dan hasil pemberdayaan agar tetap berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan program</li> <li>2. Pendampingan lanjutan</li> <li>3. Keberjalanan pemberdayaan nelayan kecil</li> </ol>
2.	Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Mardikanto dan Soebianto (2013)	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi Nelayan</li> <li>2. Potensi dan kemampuan</li> <li>3. Modal Sosial</li> </ol> <p>Faktor Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah</li> </ol>	<p>Kondisi internal masyarakat nelayan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Kondisi di luar masyarakat nelayan turut mempengaruhi proses dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan dan Kesadaran masyarakat nelayan kecil</li> <li>2. Potensi dan Kemampuan Masyarakat Nelayan kecil</li> <li>1. Peran Fasilitator dan Pemberdaya</li> </ol>

		2. Peran Fasilitator dan pendamping 3. Akses Terhadap Fasilitas	keberhasilan pemberdayaan masyarakat	2. Ketersedian Akses dan Sumber Daya
--	--	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

*Sumber: Diolah peneliti, 2025.*

## **1.9 Argumentasi Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di Desa Karangsong merupakan keharusan strategis yang mendesak untuk mengatasi paradoks antara kekayaan sumber daya laut dan kemiskinan nelayan. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas implementasi kebijakan yang sudah ada, terutama Perda No. 2 Tahun 2019, dengan fokus pada akses pendidikan, pelatihan keterampilan, literasi digital, dan partisipasi nelayan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

Meskipun Kabupaten Indramayu, khususnya Desa Karangsong, merupakan salah satu sentra produksi perikanan tangkap terbesar di Jawa Barat dengan kontribusi lebih dari 63% terhadap total produksi perikanan tangkap provinsi (BPS Jabar, 2022), kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan di daerah ini masih tergolong rendah dan rentan secara ekonomi. Ini menciptakan sebuah paradoks antara kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan kesejahteraan sosial masyarakat lokal yang belum optimal.

Penelitian ini menilai bahwa peran pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam pemberdayaan belum berjalan secara maksimal. Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2019 secara tegas mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk melalui pelatihan, akses modal, serta penguatan kelembagaan nelayan. Dalam implementasinya, perda ini masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat nelayan secara merata.

Desa Karangsong merupakan contoh konkret dari ketimpangan implementasi kebijakan, di mana produktivitas nelayan tinggi tetapi kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, teknologi, dan jaminan sosial

masih rendah. Banyak nelayan muda lebih memilih bekerja sebagai ABK tanpa keterampilan yang memadai karena minimnya pendidikan formal dan pelatihan fungsional.

Dari sudut pandang administrasi publik, hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam paradigma *governance* yang seharusnya mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola isu publik. Ketika pemberdayaan tidak dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan, maka kebijakan yang dicanangkan tidak akan berdampak signifikan terhadap transformasi sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menginvestigasi implementasi nyata dari pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Karangsong. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi program yang telah dijalankan, tetapi juga menggali faktor-faktor pendorong dan penghambat dari sisi regulasi, kapasitas SDM, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika sosial yang terjadi di lapangan, serta mendalami makna, pengalaman, dan persepsi

masyarakat nelayan terhadap program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun inisiatif lokal.

Pendekatan ini dinilai paling sesuai karena pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok nelayan, merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Proses tersebut tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, pendidikan, dan politik yang saling berkaitan, oleh karena itu, diperlukan metode yang tidak sekadar mengukur, tetapi juga menjelaskan secara holistik dinamika yang terjadi di masyarakat nelayan, termasuk hambatan, potensi, serta bentuk partisipasi mereka dalam program pemberdayaan.

#### **1.10.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangsong, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan sangat bergantung pada sektor perikanan laut sebagai sumber mata pencaharian utama. Desa Karangsong dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas sebagai desa nelayan, serta menjadi salah satu desa yang cukup aktif dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lembaga non-pemerintah.

Pemilihan Desa Karangsong ini meskipun potensi tersebut cukup tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Karangsong masih tergolong rendah. Banyak keluarga nelayan yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, dengan penghasilan yang tidak menentu dan akses terhadap fasilitas umum yang masih terbatas pula. Kondisi ini berbeda dengan Kampung Nelayan yang ada di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, yang telah memperoleh status Kampung Nelayan Sejahtera melalui intervensi langsung dari Kementerian Sosial. Di sana, pemerintah membangun 93 unit rumah layak huni lengkap dengan fasilitas umum, serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha. Hasilnya, masyarakat nelayan di Eretan Kulon mulai mengalami peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Melihat perbedaan tersebut, Desa Karangsong dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memahami lebih dalam bagaimana kondisi masyarakat nelayan saat ini, serta apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kesejahteraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk pemberdayaan yang dibutuhkan agar kehidupan nelayan di Karangsong dapat meningkat secara berkelanjutan.

### **1.10.3 Subjek Penelitian**

Untuk menentukan informan yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, teknik ini didasarkan pada informan yang dipilih ini berdasarkan kesesuaian dengan tujuan

penelitian, seperti Pihak Koperasi KPL Mina Sumitra yang dimana pihak Koperasi tersebut berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, sedangkan untuk informan yang berasal dari Masyarakat Nelayan Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, peneliti menggunakan teknik accidental sampling, yaitu pemilihan informan secara kebetulan atau berdasarkan ketersediaan di lokasi yang relevan dengan konteks penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan kecil di desa karangsong, dalam pemilihan narasumber ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, guna memastikan bahwa informan yang dipilih benar-benar relevan dan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga proses wawancara dapat menghasilkan data yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud meliputi:

**Tabel 1. 7 Informan Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Informan Penelitian</b>	<b>Jumlah Informan</b>
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu	1 Orang
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Indramayu	1 Orang
3.	Lurah Desa Karangsong Kecamatan Indramayu	1 Orang
4.	Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura (GNP) dan Staf Koperasi Mina Sumitra	1 Orang
5.	Masyarakat Nelayan Kecil 5 GT ( <i>Gross Tonnage</i> ) Desa Karangsong	4 Orang
<b>Total</b>		<b>8 Orang</b>

*Sumber: Diolah peneliti, 2025.*

#### **1.10.4 Instrumen Penelitian**

Menurut Moleong (2014), instrumen penelitian kualitatif tidak hanya terbatas pada alat fisik, melainkan meliputi peneliti itu sendiri sebagai pengumpul data, serta perangkat pendukung seperti pedoman wawancara, daftar observasi, dan catatan lapangan. Peneliti berperan aktif dalam memilih dan menyesuaikan teknik pengumpulan data sesuai situasi dan kebutuhan lapangan. Selanjutnya, Creswell (2014) menegaskan bahwa instrumen kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual. Instrumen ini dirancang untuk mengungkap makna, pengalaman, dan perspektif subjek secara detail.

#### **1.10.5 Jenis Data**

Dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada kualitas informasi daripada kuantitas. Data yang diperoleh biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek yang menggambarkan fenomena secara mendalam dan kontekstual (Moleong, 2014).

Menurut Bogdan dan Biklen (2007), data kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Data Verbal

Data ini berupa tutur kata yang diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok, dan percakapan. Data verbal menjadi sumber utama dalam

penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap pemahaman, makna, dan perspektif subjek penelitian.

## 2. Data Non Verbal

Data non-verbal meliputi ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, dan bahasa tubuh lainnya yang diperoleh melalui observasi partisipatif.

Data ini membantu peneliti memahami konteks emosional dan interaksi sosial dalam situasi penelitian.

## 3. Data Dokumenter

Data dokumenter mencakup berbagai bentuk dokumen seperti catatan lapangan, foto, video, dokumen resmi, surat kabar, dan arsip yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperkaya analisis.

### **1.10.6 Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan pengumpulan informasi yang mendalam dan komprehensif. Menurut Moleong (2014), sumber data adalah “orang, tempat, dokumen, atau benda yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan fokus penelitian.” Sumber data ini dapat berupa sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi dan pengamatan peneliti di lapangan (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian pemberdayaan masyarakat

nelayan, sumber primer biasanya berasal dari masyarakat nelayan itu sendiri, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak-pihak terkait yang memiliki peran dalam proses pemberdayaan. Data primer ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok.

## 2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang sudah ada sebelumnya dan digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer (Creswell, 2014). Contohnya adalah dokumen resmi desa, laporan program pemberdayaan, buku, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

### **1.10.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan akurat guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bersifat fleksibel dan adaptif sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penelitian.

Menurut Moleong (2014), teknik pengumpulan data kualitatif yang umum digunakan meliputi:

#### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Teknik ini

memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya, detail, dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur tergantung kebutuhan penelitian.

## 2. Observasi Partisipatif (*Participant Observartion*)

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti langsung terjun ke lapangan dan mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, dan interaksi sosial yang terjadi di lingkungan penelitian. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa pengumpulan data dari sumber tertulis maupun visual, seperti dokumen resmi, laporan kegiatan, foto, arsip, dan catatan lapangan. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

### **1.10.8 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis untuk mengelola dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar dapat menemukan pola, tema, dan makna yang terkandung dalam data tersebut. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif meliputi tiga aktivitas utama yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta materi empiris lainnya. Peneliti melakukan proses ini untuk mempertajam, menyortir, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengorganisasikan dan menyatukan informasi ke dalam bentuk yang padat dan mudah diakses. Melalui penyajian data, peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi dan menentukan tindakan selanjutnya, baik untuk melakukan analisis lebih mendalam atau melangkah ke tahap penarikan kesimpulan. Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang deskriptif mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan. Penyajian yang terstruktur ini memudahkan peneliti melihat pola interaksi dan keterlibatan warga secara menyeluruh.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menarik makna, pola, serta hubungan antar fenomena. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat berubah jika data baru ditemukan. Oleh

karena itu, proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan kesimpulan.

#### **1.10.9 Kualitas dan Validitas Data**

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan hasil penelitian, peneliti menerapkan kriteria kualitas data (*goodness criteria*) sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017). Dalam penelitian kualitatif, kualitas data tidak dinilai berdasarkan validitas dan reliabilitas seperti pada pendekatan kuantitatif, melainkan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif itu sendiri.

Pertama, keabsahan data (*validity*) diperoleh melalui teknik triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi sumber juga dilakukan dengan melibatkan berbagai narasumber, seperti nelayan, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, guna memastikan data yang diperoleh mencerminkan realitas yang sebenarnya.

Kedua, keandalan data (*reliability*) dijaga dengan cara melakukan pencatatan data secara sistematis dan rinci, serta melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara agar proses pengumpulan data tetap konsisten di seluruh responden. Ketiga, objektivitas data diusahakan dengan menjaga agar penafsiran dan analisis data tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti. Untuk itu, peneliti melakukan refleksi diri dan konsultasi dengan pembimbing guna menghindari bias dalam proses interpretasi data.